

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris, dikarenakan sebagian wilayah Indonesia terdiri atas lahan pertanian. Hampir 30% angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Salah satu kekayaan alam Indonesia yaitu mempunyai tanah yang relatif subur yang dapat dikelola untuk berbagai bidang pertanian¹. Tanah tersebut dapat dipergunakan untuk tanaman pangan, tanaman keras, ladang pengembalaan, dan perikanan.

Maka dari itu, pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran strategis dan penting dalam kehidupan. Bagi negara, sektor pertanian merupakan sektor yang paling mempengaruhi perekonomian negara. Hampir seperlima dari Produk Domestik Bruto (PDB) disumbangkan oleh sektor pertanian. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa bidang pertanian memberikan kontributor kedua terbanyak dalam hal pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah :

¹ BPS go.id

Tabel 1.1
Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga
Berlaku dalam (Persen) di Indonesia pada Tahun 2020

Kategori	Sektor	2020	
		I	II
A	Pertanian	13,64%	16,01%
B	Pertambangan dan Penggalian	7,04%	6,50%
C	Industri Pengolahan	20,64%	20,58%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,21%	1,18%
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08%	0,08%
F	Konstruksi	11,05%	10,85%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,26%	13,19%
H	Transportasi dan Perdagangan	5,34%	3,67%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,89%	2,34%
J	Informasi dan Komunikasi	4,39%	4,79%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,85%	4,56%
L	Real Estate	2,97%	3,14%
M	Jasa Perusahaan	2,06%	1,88%
N	Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,73%	3,90%
O	Jasa Pendidikan	3,42%	3,63%
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,23%	1,26
Q	Jasa Lainnya	2,12%	1,91

Sumber : BPS Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan Tahun 2016-2020

Selain memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PDB Indonesia, ternyata sektor pertanian juga menjadi sektor yang menyumbang penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Surhiyanto yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian tumbuh 29,76 persen. Sehingga sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak diminati masyarakat di masa pandemi². Pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Persentase Penduduk Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan (Agustus 2020)

Nomor	Sektor	Persentase Pekerjaan
1	Pertanian	29,76%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,05%
3	Industri Pengolahan	13,61%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,24%
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,38%
6	Konstruksi	6,28%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,23%
8	Transportasi dan Pergudangan	4,35%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,65%
10	Informasi dan Komunikasi	0,73%

² Dwi Aditya Putra, Dampak Pandemi Masyarakat Bekerja di Sektor Pertanian Mengalami Peningkatan, merdeka.com, diakses pada 7 November 2021

11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,21%
12	Real Estate	0,31%
13	Jasa Perusahaan	1,4%
14	Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,56%
15	Jasa Pendidikan	4,69%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,56%
17	Jasa Lainnya	4,99%

Sumber: BPS.go.id

Berdasarkan data tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang paling banyak menyerap angkatan kerja yaitu di bagian sektor pertanian. Tercatat, pada tahun 2020 sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 29,76 persen yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 19,23 persen dan diposisi ketiga oleh sektor industri pengolah sebesar 13,61 persen. Pada masa pandemi, masyarakat yang kena PHK atau diberhentikan kerja oleh perusahaan mulai beralih bekerja sebagai petani untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan kehidupannya. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Pertanian juga sebagai sumber pendapatan utama petani serta penyedia bahan-bahan pokok agar inflasi tetap. Selain itu, sektor pertanian juga turut menyumbangkan devisa yang cukup besar bagi Indonesia.

Di sisi lain, selain menyumbang penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, sektor pertanian juga menjadi sektor yang krusial dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menjelaskan bahwa

ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Juga tidak bertentangan terhadap agama, keyakinan, dan budaya masyarakat agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan³. Sehingga pemenuhan akan pangan juga termasuk dari bagian dari hak asasi manusia. Karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia, maka pangan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun, permasalahan akan ketersediaan pangan masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Pemerintah. Meskipun negara Indonesia dikenal dengan negara agraris, ternyata mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang baik bukanlah sesuatu yang mudah. Menurut Achmad Suryana, tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan ketahanan pangan di setiap daerah yaitu tantangan pada sisi penyediaan pasokan dan tantangan pada sisi pemenuhan kebutuhan. Empat masalah yang harus diatasi pada tantangan di sisi penyediaan pasokan adalah kendala sumber daya alam, pertanian masih didominasi usaha tani skala kecil, dampak perubahan iklim global, dan ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah. Sedangkan tantangan di sisi pemenuhan kebutuhan ada dua masalah yang harus diatasi yaitu perubahan selera masyarakat dan konsumsi pangan⁴.

³ Undang Undang no 18 tahun 2012, Pangan

⁴ Achmad Suryana, Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Bogor, 2014, hal. 128

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, dijelaskan dalam pasal 41 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, dapat dilakukan dengan cara penganeekaragaman pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal. Di samping untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, kegiatan penganeekaragaman pangan juga ditujukan untuk mengembangkan usaha pangan. Pada akhirnya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penganeekaragaman pangan tersebut dilakukan dengan cara :

- A. Penetapan kaidah penganeekaragaman pangan.
- B. Pengoptimalan pangan lokal.
- C. Pengembangan teknologi dan sistem intensif bagi usaha pengolahan pangan.
- D. Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan.
- E. Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan.
- F. Peningkatan ketersediaan, akses benih, bibit tanaman, ternak, dan ikan.
- G. Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan.
- H. Penguatan usaha mikro,kecil, dan menengah di bidang pangan.
- I. Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.

Dari amanat Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan tersebut, dapat dijelaskan bahwa ketahanan pangan yang harus dibangun mulai pada tingkat rumah tangga dan bertumpu pada keragaman sumber daya lokal. Dengan didasarkan

pada sumber daya dan budaya lokal maka ketahanan pangan akan kokoh dan tidak akan mudah terpengaruh oleh masalah pasokan pangan yang terjadi di luar wilayah. Sehingga ketahanan pangan suatu daerah akan terjamin dan tidak mengalami penurunan kebutuhan akan pangan.

Di samping itu, yang masih menjadi persoalan dalam ketahanan pangan adalah, peningkatan produksi pangan belum diikuti oleh penanganan kerawanan pangan masyarakat. Di mana setiap tahunnya jumlah penduduk yang meningkat dan jumlah produksi pertanian untuk pangan masih tergolong statis atau hanya mengalami kenaikan yang sedikit, dan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang melaju cepat tidak dapat diiringi dengan pertumbuhan pangan tiap tahunnya. Seperti dikatakan oleh Thomas Robert Malthus dalam Mulyadi bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur (*geometric progression*, 2 ke 4,8,16, seterusnya), sedangkan pertumbuhan produksi pangan hanya mengikuti deret hitung (*arithmetic progression*, 2 ke 4, 6,8, seterusnya). Artinya, jumlah peningkatan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan jumlah produksi pangan. Malthus juga menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah populasi maka suatu waktu semakin banyak bayi yang dilahirkan dan mengakibatkan populasi setiap generasi semakin tinggi. Sementara daya dukung lingkungan seperti tanah dan air cuma mengikuti deret aritmatika. Sehingga pada suatu waktu jumlah populasi melebihi ketersediaan jumlah pangan⁵.

⁵ Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2003, hal. 6

Bangsa Indonesia dengan pertumbuhan penduduk positif apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan. Apabila pemenuhan kebutuhan pangan dapat dikendalikan maka ketahanan pangan di Indonesia terjamin. Kebutuhan pangan yang senantiasa meningkat apabila tidak tercukupi maka mengalami kerawanan pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.⁶ Kerawanan pangan dapat disebabkan oleh kegagalan produksi pertanian dan pendapatan masyarakat yang menurun. Sehingga dengan adanya problema tersebut, Apabila hal tersebut berkelanjutan dapat mengarah ke situasi kelaparan. Dalam pemenuhan akan pangan yang rendah mengakibatkan kebutuhan asupan zat gizi bagi masyarakat di suatu daerah berkurang⁷. Apabila kerawanan pangan suatu daerah tersebut tergolong tinggi, maka daerah tersebut memiliki ketahanan pangan cukup rendah begitu pula sebaliknya. Jadi dalam membangun ketahanan pangan tersebut juga mempertimbangkan kerawanan pangan yang harus dihadapi suatu daerah agar persentase ketahanan pangan di suatu daerah meningkat.

⁶ Peraturan Menteri Pertanian no 43 tahun 2010, Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

⁷ Temmy Suprihartini, Proses terjadinya kerawanan pangan dan gizi, pertanian.pontianakkota.go.id, diakses 11 november 2020

Untuk mengukur capaian kinerja pembangunan sektor pertanian di suatu daerah maka, ketahanan pangan di daerah diukur berdasarkan indeks ketahanan pangan. Indeks ketahanan pangan merupakan sebuah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, juga sebagai landasan penetapan program intervensi dan lokasi wilayah dalam upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan.

Dalam penyusunan indeks ketahanan pangan tersebut dilihat berdasarkan tiga aspek. Ketiga aspek tersebut adalah aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan⁸. Sehingga kinerja pembangunan ketahanan pangan di suatu daerah dapat dilihat dan dievaluasi. Setelah diukur ketahanan pangan berdasarkan tiga aspek di atas, nilai tertinggi dari indeks ketahanan pangan kota dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel 1.3
Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota tahun 2018-2020

Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Ra nk	Nama Kota	Skor	Ra nk	Nama Kota	Skor	Ran k	Nama Kota	Skor
1	Denpasar	92,81%	1	Denpasar	89,84%	1	Denpasar	93,32%
2	Jakarta Selatan	87,72%	2	Balikpapan	88,74%	2	Bukittinggi	89,01 %
3	Jakarta Barat	87,03%	3	Jakarta Selatan	88,56%	3	Balikpapan	87,66%
4	Semarang	85,93%	4	Bukittinggi	88,02 %	4	Banda Aceh	85,32%

⁸ Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Indeks Ketahanan Pangan, 2019, hal 6

5	Jakarta Utara	85,71%	5	Jakarta Timur	87,31%	5	Madiun	85,23%
6	Jakarta Pusat	84,66%	6	Jakarta Pusat	87,01%	6	Batam	85,09%
7	Surabaya	84,44%	7	Bandung	86,87%	7	Jakarta barat	85,06%
8	Jakarta Timur	84,43%	8	Bekasi	86,85%	8	Kendari	84,91%
9	Balikpapan	83,62%	9	Jakarta Barat	86,85%	9	Surabaya	84,71%
10	Bukittinggi	83,45%	10	Semarang	86,40%	10	Semarang	84,66%

Sumber : Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2018-2020

Berdasarkan data pada tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi pada tahun 2018 peringkatnya berada di nomor 10 dalam ketahanan pangan kota dengan skor 83,45 persen, kemudian di tahun 2019 skor ketahanan pangan Kota Bukittinggi mengalami kenaikan menjadi 88,02 persen sehingga Kota Bukittinggi naik peringkat menjadi nomor 4 dalam hal ketahanan pangan antar kota, sedangkan di tahun 2020 skor ketahanan pangan Kota Bukittinggi mengalami kenaikan 1,01 persen menjadi 90,02 persen dan naik lagi menjadi nomor 2 dalam hal ketahanan pangan. Tiga tahun berturut turut Kota Bukittinggi masuk dalam peringkat 10 besar dalam penilaian ketahanan pangan dan tiga tahun tersebut Kota Bukittinggi mengalami kenaikan skor ketahanan pangan tanpa adanya penurunan skor.

Gambar 1.1 Piagam Penghargaan Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi



Atas situasi meningkatnya ketahanan pangan di kota Bukittinggi, pada tanggal 8 bulan Juli tahun 2021 Badan Ketahanan Pangan memberikan penghargaan kepada kota Bukittinggi di Hotel Pangeran Beach sebagai kota dengan ketahanan pangan terbaik 2018-2020. Penilaian tersebut dilakukan pada 98 kota diseluruh Indonesia dengan melihat dari aspek keterjangkauan pangan dan aspek pemanfaatan pangan melalui angka IKP. Kota Bukittinggi menjadi satu-satunya daerah di luar Jawa yang memperoleh penghargaan ketahanan pangan terbaik periode 2018-2020⁹.

Sedangkan perbandingan daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2020

Tahun 2019			Tahun 2020		
Rank	Kota/Kabupaten	Skor	Rank	Kota/Kabupaten	Skor
1	Bukittinggi	88,02%	1	Bukittinggi	89,01%
2	Solok	85,40%	2	Tanah Datar	84,88%
3	Tanah Datar	85,22%	3	Pesisir Selatan	84,65%
4	Padang	83,33%	4	Agam	84,10%
5	Pesisir Selatan	82,77%	5	Padang Panjang	82,32%
6	Agam	82,49%	6	Padang	82,12%
7	Payakumbuh	80,66%	7	Payakumbuh	82,06%
8	Solok Selatan	80,13%	8	Solok	82,02%
9	Padang Panjang	80,01%	9	Solok Selatan	81,00

⁹ Kota Bukittinggi Sebet Penghargaan “Kota Dengan Ketahanan Pangan Terbaik 2018-2020”, Kabar Berita, diakses 28 oktober 2020

10	Limapuluh Koto	79,40%	10	Padang Pariaman	80,99%
11	Pasaman	79,28%	11	Limapuluh Koto	80,42%
12	Padang Pariaman	79,06%	12	Pasaman	79,73%
13	Kab. Solok	78,60%	13	Kab. Solok	79,57%
14	Dharmasraya	77,61%	14	Pasaman Barat	78,35%
15	Sijunjung	77,35%	15	Dharmasraya	78,13%
16	Pasaman Barat	77,17%	16	Sijunjung	77,85%
17	Pariaman	71,04%	17	Pariaman	72,87%
18	Sawah Lunto	65,89%	18	Sawah Lunto	67,36%
19	Kepulauan Mentawai	38,86%	19	Kepulauan Mentawai	46,67%

Sumber : Olahan peneliti

Berdasarkan data pada tabel 1.4 di atas, kota Bukittinggi masih mengungguli dalam hal ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam kebutuhan masyarakat akan pangan, sehingga Kota Bukittinggi dalam mencakupi kebutuhan masyarakatnya dan akses dalam pemenuhan kebutuhan dapat dikatakan lebih dari cukup dalam memenuhi pasokan kehidupannya. Keberlangsungan hidup masyarakat Kota Bukittinggi yang tejamin, aman, dan terkendali dalam pemenuhan akan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pada penilaian IKP, sudah dijelaskan diatas melihat dari tiga aspek atau yang kita kenal dengan sebutan 3 pilar ketahanan pangan. Yang pertama yaitu Ketersediaan pangan, ketersediaan pangan merupakan kondisi tersedianya pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah

tersebut, stok yang dimiliki pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari organisasi lainnya. Pada Kota Bukittinggi ketersediaan pangan yang cukup diakibatkan oleh banyaknya pedagang yang berasal dari kota Bukittinggi atau dari luar Kota Bukittinggi yang berdagang di wilayah kota Bukittinggi. Sehingga dalam pemenuhan ketersediaan pangan masyarakat kota Bukittinggi dapat terjamin. Berbagai bahan pokok yang dijual pedagang di pasar- pasar Kota Bukittinggi, seperti beras, sayur, ayam, ikan, buah-buahan, dan lain-lain. Jadi, pemenuhan akan gizi Kota Bukittinggi sudah aman dikarenakan sumber bahan pokok sudah berada di Kota Bukittinggi. Berikut jumlah ketersediaan pangan yang ada di Kota Bukittinggi pada tahun 2018-2020 :

TABEL 1.5
Ketersediaan Pangan Untuk Dikonsumsi Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020

NO	Kelompok Pangan	Ketersediaan Pangan (Kg/Kapita/Tahun)		
		2018	2019	2020
1	Padi - Padian	173,43	174,85	171,84
2	Makanan Berpati	18,13	32,30	33,69
3	Gula	6,81	7,25	7,61
4	Buah/ Biji Berminyak	8,03	8,49	9,43
5	Buah - Buah	68,04	41,61	45,49
6	Sayur – Sayuran	80,19	50,73	52,05
7	Daging	22,44	21,67	22,20
8	Telur	15,28	10,77	11,26
9	Susu	5,98	3,61	3,67
10	Ikan	24,08	22,00	22,91
11	Minyak & Lemak	15,52	14,03	14,91

Sumber : Neraca Bahan Makanan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, Ketersediaan pangan di Kota Bukittinggi untuk padi-padian mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Padi- padian merupakan salah satu kelompok bahan makanan yang menyumbang energi terbesar

dalam ketersediaan pangan. Sehingga kelompok padi-padian merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh masyarakat Kota Bukittinggi. Berdasarkan kesimpulan dari dokumen neraca bahan makanan, ketersediaan pangan untuk daerah Kota Bukittinggi mengalami kondisi surplus. Kondisi surplus ini disebabkan karena Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan wilayah untuk memasarkan kelompok pangan dari daerah sekitar Kota Bukittinggi. Ketersediaan pangan Kota Bukittinggi sangat bergantung kepada pasokan dari luar daerah kecuali daging sapi, daging kerbau, cabe rawit, dan jagung. Kota Bukittinggi merupakan tempat persinggahan komoditi pangan dari daerah sekitar Kota Bukittinggi sebelum diekspor. Ketergantungan ini dikarenakan kebanyakan wilayah di area Kota Bukittinggi dipergunakan pembangunan. Walaupun wilayah kota Bukittinggi sudah banyak dijadikan infrastruktur bangunan yang mengakibatkan hasil produksi kota Bukittinggi kecil, namun dapat diatasi dengan adanya pedagang dari luar kota Bukittinggi yang membantu pemenuhan ketersediaan pangan masyarakat kota Bukittinggi.

Selanjutnya pada keterjangkauan pangan, keterjangkauan pangan merupakan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh ketersediaan pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, menukar (barter), dan bantuan pangan. Dalam hal keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pangan, masyarakat dalam memenuhi kecukupan pangan melihat apakah masyarakat sanggup atau tidak dalam memenuhi kecukupan pangan untuk di konsumsi. Finansial suatu individu juga mempengaruhi apakah masyarakatnya terjangkau atau tidak dalam pemenuhan mereka akan konsumsi pangan. Jadi apabila masyarakat sudah berada diatas garis kemiskinan

dapat dinyatakan bahwa masyarakat kota tersebut mampu dan terjangkau dalam pemenuhan pangannya. Berikut data persentase kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 :

TABEL 1.6

Kemiskinan di Kota/Kabupaten Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Kab/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)	HCI-Po
1	Kepulauan Mentawai	14,31	14,84
2	Pesisir Selatan	37,41	7,92
3	Kab. Solok	30,36	8,01
4	Sijunjung	16,81	6,80
5	Tanah Datar	15,89	4,54
6	Padang Pariaman	30,41	7,22
7	Agam	34,26	6,85
8	Lima Puluh Kota	28,51	7,29
9	Pasaman	21,57	7,48
10	Solok Selatan	13,41	7,52
11	Dharmasraya	17,60	6,67
12	Pasaman Barat	34,97	7,51
13	Padang	48,44	4,94
14	Kota Solok	2,31	3,12
15	Sawah Lunto	1,52	2,38
16	Padang Panjang	3,28	5,92
17	Bukittinggi	6,98	5,14
18	Payakumbuh	8,66	6,16
19	Pariaman	3,99	4,38
Sumatera Barat		370,67	6,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, Penduduk Kota Bukittinggi dan Kemiskinan Tahun 2021

Salah satu indikator yang mempengaruhi keterjangkauan masyarakat untuk dapat memperoleh pangan adalah persentase penduduk dibawah garis kemiskinan. HCI Po merupakan persentase penduduk yang berada pada bawah garis kemiskinan. Pada Kota Bukittinggi untuk persentase kemiskinan berada di bawah garis miskin pada tahun

2021 adalah 5,14 persen, yang berarti jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang berada dibawah garis kemiskinan tidak terlalu besar. Semakin kecil tingkat kemiskinan maka semakin besar keterjangkauan pangan yang masyarakat peroleh di daerah tersebut. Sehingga hal inilah yang menyebabkan masyarakat Kota Bukittinggi dalam kemampuan dalam keterjangkauan pangan dapat mereka peroleh dan mereka konsumsi.

Dan terakhir adalah pemanfaatan pangan, pemanfaatan pangan adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh dan pemanfaatan pangan yang bisa diakses olehnya. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya. Untuk pemanfaatan pangan ini sangat berpengaruh kepada ketahanan pangan daerah. Dikarenakan masyarakat harus mendapatkan konsumsi yang baik yang dilihat pemenuhan kecukupan energinya dan kecukupannya dalam pemenuhan protein agar masyarakat dapat tumbuh dengan baik. Pada pemanfaatan pangan ada beberapa indikator yang mempengaruhinya yaitu jumlah kasus prevalensi di suatu daerah dan akses air bersih di suatu wilayah. Berikut data persentase kasus prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat :

TABEL 1.7

Data Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Kab/ Kota	Persentase
1	Kepulauan Mentawai	27,3
2	Pesisir Selatan	25,2
3	Kab. Solok	40,1
4	Sijunjung	30,1
5	Tanah Datar	21,5

6	Padang Pariaman	28,3
7	Agam	19,1
8	Lima Puluh Kota	28,2
9	Pasaman	30,2
10	Solok Selatan	24,5
11	Dharmasraya	19,5
12	Pasaman Barat	24,0
13	Padang	18,9
14	Kota Solok	18,5
15	Sawah Lunto	21,1
16	Padang Panjang	20,0
17	Bukittinggi	18,0
18	Payakumbuh	20,0
19	Pariaman	20,3

Sumber : BKKBN Sumatera Barat

Pada pilar pemanfaatan pangan ada beberapa indikator yang mempengaruhi ketahanan pangan di suatu daerah. Salah satu indikatornya adalah prevalensi stunting di suatu daerah. Pada Kota Bukittinggi kasus prevalensi stunting yang terjadi adalah 18 persen pada tahun 2021. Angka prevalensi stunting sangat mempengaruhi pemanfaatan pangan, yaitu pada penyerapan individu pada zat gizi secara efisien pada tubuh. Semakin rendah persentase prevalensi stunting maka semakin bagus ketahanan pangan yang ada di daerah tersebut. Maka, untuk melihat ketahanan pangan daerah berbagai aspek mereka nilai dan lihat tanpa kecuali kandungan gizi yang masyarakat makan agar tidak banyak kasus stunting yang terjadi di daerah ini.

Selanjutnya yang mempengaruhi pemanfaatan pangan adalah faktor sumber air bersih. Dalam proses pengelolaan pangan dibutuhkanlah air yang bersih agar lebih aman dan steril. Bahkan ada beberapa olahan pangan yang menggunakan sumber air bersih untuk pemenuhan pangannya. Berikut data rumah tangga tanpa akses air bersih di Provinsi Sumatera Barat :

TABEL 1.8

Data Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/ Kota	Persentase RT Tanpa Air Bersih		
		2019	2020	2021
1	Kepulauan Mentawai	68,08	72,75	72,75
2	Pesisir Selatan	22,69	17,70	25,51
3	Kab. Solok	31,94	30,43	36,36
4	Sijunjung	32,30	30,61	35,55
5	Tanah Datar	26,26	25,68	35,55
6	Padang Pariaman	35,29	24,79	26,96
7	Agam	32,28	26,07	25,10
8	Lima Puluh Kota	36,68	35,56	36,53
9	Pasaman	34,13	34,82	29,97
10	Solok Selatan	37,51	27,39	23,34
11	Dharmasraya	39,42	29,86	23,92
12	Pasaman Barat	40,76	32,91	33,09
13	Padang	9,87	2,08	4,13
14	Kota Solok	1,71	3,99	1,79
15	Sawah Lunto	15,22	8,24	8,59
16	Padang Panjang	5,23	6,38	10,32
17	Bukittinggi	2,88	4,67	4,78
18	Payakumbuh	2,61	2,35	1,91
19	Pariaman	17,51	17,20	17,21

Sumber : *Sumbar.bps.go.id*

Selanjutnya yang mempengaruhi akan pemanfaatan pangan adalah ketersediaan air bersih di daerah tersebut. Sumber air bersih merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki bagi setiap daerah. Berbagai manfaat dipergunakan dari air bersih., pada Pemanfaatan pangan air bersih tersebut dapat dipergunakan untuk pengolahan pangan agar lebih higienis dan steril dari kuman. Rumah tangga tanpa air bersih untuk Kota Bukittinggi mengalami kenaikan namun tidak dibatas sangat membutuhkan air bersih. Sehingga air bersih juga menjadi penentu untuk ketahanan pangan daerah. Semakin banyak akses sumber air bersih di daerah tersebut, maka semakin bagus dalam pemanfaatan pangannya terutama untuk gizinya.

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi dalam penyelenggaraan penyediaan kebutuhan masyarakat akan pangan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah. Serta peran pemerintah daerahlah yang mengelola dan mengatur bagaimana caranya agar kebutuhan akan pangan dapat dicukupi oleh pemerintah daerah. Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan pangan bertanggung jawab untuk berbagai faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan serta merumuskan alternatif pencapaian ketahanan pangan ideal maka, tugas dan wewenang tersebut diarahkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi yang diberikan tugas tersebut memiliki keterikatan akan membangun ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan salah satu bidang yang mempunyai peran, tugas, dan wewenang akan ketahanan pangan terdapat didalam Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi. Sehingga Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi bukan cuma mengurus di bidang pertanian dan distribusi pangan, tetapi juga mengurus perihal ketahanan pangan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang disampaikan Walikota Bukittinggi tahun 2020-2025, maka dapat dijelaskan visi Kota Bukittinggi dan Misi kota Bukittinggi di sektor Pertanian adalah Visi, Menciptakan Bukittinggi hebat, berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Misi, Hebat'' Dalam Sektor Pertanian yaitu berupa Meningkatkan ketahanan pangan dan terpenuhinya akses

pangan yang bergizi di kota Bukittinggi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian melalui kelompok tani. Mendorong terciptanya agroindustri kota Bukittinggi yang dapat berdaya saing global. Mengembangkan kawasan pertanian menjadi Kawasan agrowisata. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan mensejahterakan dari sektor pertanian.

Menurut Dalton E. Mc Farland, salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Pada perencanaan Dinas melaksanakan visi dan misi dari kota Bukittinggi di sektor pertanian dalam mencapai tujuan, maka dinas sudah mencoba untuk mengimplementasikan ketahanan pangan dalam rencana kegiatan beberapa tahun terakhir. Berikut tabel perencanaan penganggaran kegiatan dinas pertanian dan pangan Kota Bukittinggi :

Tabel 1.9

Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	12.000.000
2	Pemantauan informasi Harga Pangan	30.000.000
3	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	10.000.000
4	Koordinasi, Evaluasi, dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	9.000.000
5	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	30.000.000
6	Bazar Bahan Pangan	9.841.000
Total		100.841.000

Sumber : Arsip Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Lakip 2019

Pada tabel 1.9, dalam pelaksanaan program urusan ketahanan pangan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, maka memiliki 6 kegiatan yang akan dilakukan dalam membangun ketahanan pangan. Program peningkatan ketahanan pangan memiliki anggaran sebesar Rp.100.841.000, dirincikan diatas ke beberapa kegiatan. Sehingga pada tabel diatas jelas berapa anggaran yang akan digunakan dinas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan pertanian atau perkebunan Kota Bukittinggi.

Sedangkan pada tahun 2020, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi juga melakukan perencanaan penganggaran pada program dan kegiatan yang akan mereka lakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10
Anggaran Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	8.201.000
2	Pemantauan Informasi Harga Pangan	18.749.500
3	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	7.431.500
4	Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	5.529.000
5	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	28.180.000
Total		68.091.000

Sumber : Arsip Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Lakip 2020

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi memiliki 5 kegiatan yang dilakukan dalam membangun ketahanan pangan. Namun dalam hal anggaran Mengalami pengurangan, jumlah anggaran di program peningkatan ketahanan pangan pertanian atau perkebunan sebesar Rp. 68.091.000

Dalam pelaksanaan kegiatan dalam membangun ketahanan pangan, kegiatan yang tidak ada pada tahun 2021 adalah koordinasi dewan ketahanan pangan. Pada tahun 2021 dibubarkannya dewan ketahanan pangan dikarenakan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 112 Tahun 2020 pada 26 November 2020. Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga negara non- kementerian yang termasuk salah satunya dewan ketahanan pangan¹⁰. Sehingga dengan dikeluarkannya PP tersebut membuat Dinas dalam melaksanakan kegiatan membangun ketahanan pangan kurangnya komunikasi dan kerjasama dengan dinas- dinas lain yang tergabung dalam dewan ketahanan pangna. Berikut kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dalam membangun ketahanan pangan untuk tahun 2021. Pada pelaksanaan kegiatan membangun ketahanan pangan pada tahun 2021 yang memiliki 4 kegiatan untuk membangun ketahanan pangan. Penjabaran dari kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Kegiatan ini memiliki sub kegiatan;

¹⁰ Dendy Sundayana, Presiden Joko Widodo Bubarkan Dewan Ketahanan Pangan, DeskJabardotcom, diakses 1 Februari 2022

A. Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan. Pada pelaksanaan kegiatan ini, dinas menunjuk salah satu petugas untuk mengecek harga pangan yang rutin dilakukan setiap hari. Dan menyusun Neraca Bahan Makanan.

B. Kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dimana kegiatan ini merupakan kegiatan perkarangan pangan lestari (P2L) yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Kegiatan ini ditargetkan kepada kelompok wanita tani agar dapat memanfaatkan lahan kosong untuk meningkatkan ketersediaan pangan

2. Kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

A. kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan ini memberikan pembekalan kepada masyarakat dalam pemanfaatan hasil produksi daerah setempat dalam pemenuhan gizi selain beras dan tepung.

B. Kegiatan pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun. sesuai dengan angka kecukupan gizi. Kegiatan ini dibantu juga oleh Dinas Kesehatan kota Bukittinggi dalam melihat kebutuhan rata rata zat gizi dipenuhi oleh masyarakat kota Bukittinggi.

3. Kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah,

- A. kegiatan merekomendasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah. Pada pelaksanaannya kegiatan ini menguji sampel segar asal tumbuhan.
 - B. Kegiatan peningkatan mutu pangan, pada pelaksanaan kegiatan ini dinas memberikan pelatihan dan pembinaan pengolahan hasil tani yang dilaksanakan pada UP3HP kota Bukittinggi.
4. Kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan, kegiatan ini bertujuan untuk membuat peta ketahanan dan kerawanan pangan di setiap kecamatan yang berada di kota Bukittinggi.

Dalam proses perencanaan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi sudah melakukan penganggaran terhadap pelaksanaan kegiatan. Bahkan daftar-daftar kegiatan yang akan dilaksanakan sudah dicantumkan semuanya agar tujuan yang ditetapkan dinas tercapai. Kegiatan dalam membangun ketahanan pangan yang disusun sudah sesuai dalam rencana strategis tahun 2016-2021. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, dinas memiliki tujuan yang jelas kearah mana dia akan bergerak.

Pada perencanaan kegiatan- kegiatan diatas, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada beberapa instansi yang ikut mendukung dan membangun ketahanan pangan daerah. Dalam Upaya yang dilakukan dinas untuk membangun ketahanan pangan berbagai faktor yang mereka perhatikan agar ketahanan pangan daerah selalu baik dan meningkat. Agar ketahanan pangan daerah dapat terjamin, maka ada beberapa SKPD yang terlibat dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan daerah. Hal

ini disampaikan oleh Kepala Bidang ketahanan pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi :

“Dalam rangka membangun ketahanan pangan daerah, ada beberapa sektor yang ikut terlibat sebagai pendukung dalam peningkatan ketahanan pangan daerah. Yaitu Dinas Kesehatan yang berperan mengawasi keamanan pangan masyarakat Kota Bukittinggi seperti nilai gizi konsumsi pangan dan kemudian dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang berperan sebagai penyedia sarana pelaku industri pangan untuk UP3HP dan mengawasi harga pangan di pasar pasar yang ada di Kota Bukittinggi untuk harga stabil dan masyarakat terjangkau dalam pemenuhan akan pangan”

(Wawancara dengan Ir. Nelfia, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, pada 20 Juli 2022 10.00 wib)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk membangun ketahanan daerah berpedoman kepada tiga pilar ketahanan pangan. Berbagai aspek dan indikator yang dilihat dalam menilai dan melihat pembangunan ketahanan pangan daerah. Sehingga ada juga beberapa Dinas terlibat dalam membangun ketahanan pangan Kota Bukittinggi. Instansi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.11

Aktor Pendukung dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan

No	Nama Instansi	Tugas
1	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi	- Penyedia sarana industri pangan untuk UP3HP di Kota Bukittinggi agar ketersediaan pangan meningkat, dan mempermudah masyarakat dalam menjangkau pangan.

		- Ikut Mengawasi Harga Pangan di pasar agar harga produk pangan di pasar sesuai dengan harga pasar dan mempermudah masyarakat dalam menjangkau ketersediaan pangan.
2	Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	- Terlibat dalam mengawasi keamanan pangan daerah, agar masyarakat kota Bukittinggi dalam pemanfaatan pangan terpenuhinya gizi dan nutrisi dari pangan. - Mengawasi Terpenuhinya Angka Kecukupan Gizi di Kota Bukittinggi

Sumber : Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan Tabel 1.11 diatas adanya peran dari insntansi lain untuk membangun ketahanan pangan Kota Bukittinggi. Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing instansi. Sehingga ada perbedaan bagian tugas yang dilaksanakan oleh instansi dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan di Kota Bukittinggi.

Pada fungsi pengorganisasian, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi bergerak atas dasar peraturan walikota yaitu dari Perwako No 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organiasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan. Tugas dan Fungsi setiap anggota dapat juga kita lihat dari Tupoksi yang dimiliki dinas tersebut. Dalam pengorganisasian sudah ada peraturan yang mengatur organisasi dinas dalam bergerak dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dinas tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi :

“...Dalam pengelolaan ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi bergerak atas dasar perwako No 58 Tahun 2018 tentang jadwal retensi arsip substantive urusan pertanian dan ketahanan pangan; perwako No 21 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan pangan non tunai tahun 2018; dan perwako No 62 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan. Jadi dinas kami dalam pengelolaannya bergerak atas aturan tersebut dik.”

(Wawancara melalui WA dengan Febriko Robianto, S.E, M.M, Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 11.00 wib).

Selanjutnya yang memiliki peran dalam membangun ketahanan adalah Dinas

Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, yang bertanggung jawab dan memiliki tugas tersebut merupakan bidang ketahanan pangan. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan ketahanan pangan akan diserahkan kepada bidang ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian Pangan Kota Bukittinggi:

“...Kalau berbagai hal yang menyangkut dengan ketahanan pangan, bidang yang menaungi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah bidang ketahanan pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi. Jadi Kalau adik ada sesuatu yang dipertanyakan terkait ketahanan pangan bisa ditanya kok kepada Ibu Kabid Ketahanan pangan.”

(Wawancara melalui WA dengan Febriko Robianto, S.E, M.M, Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 11.00 wib).

Pada proses pengorganisasian yang dijelaskan diatas, dalam pelaksanaan membangun ketahanan pangan tercapai maka tugas dan fungsi tersebut diserahkan kepada bidang ketahanan pangan. Didalam Perwako no 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanian dan

pangan menjelaskan bahwa bidang ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan. Bidang ketahanan pangan memiliki fungsi dalam pengelolaan pangan di Kota Bukittinggi, seperti penyiapan pengelolaan cadangan pangan, bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanam pangan, dan penyiapan data informasi pangan.

Dalam menyelenggarakan fungsi diatas, maka bidang ketahanan pangan memberikan peran kepada 3 seksi dalam membantu membangun ketahanan pangan. Ketiga seksi tersebut adalah seksi ketersediaan dan kerawanan pangan yang bertugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, seksi distribusi dan cadangan pangan yang bertugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan, dan seksi konsumsi dan keamanan pangan yang bertugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Selanjutnya dalam membangun ketahanan pangan daerah, dinas menargetkan kepada Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Unit Pengembangan Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (UP3HP) dalam penyuluhan, pelatihan dan bimbingan kepada mereka. Dikarenakan hasil produksi Padi- padian dan sayur- sayuran di Kota Bukittinggi terbatas maka kelompok wanita tani dan Gapoktan di Kota Bukittinggi menjadi sasaran dalam peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kelompok wanita tani lebih berfokus pada produksi sayur- sayuran sedangkan

Gapoktan lebih berfokus dalam peningkatan produksi padi daerah maka dalam membangun ketahanan pangan Kota Bukittinggi Dinas berupaya dalam meningkatkan hasil produksi daerah. Sehingga Kelompok- Kelompok tersebut menjadi target sasaran dinas dalam membangun ketahanan pangan. Dalam membangun ketahanan pangan, Terdiri atas 138 kelompok/ komoditi yang ada di Kota Bukittinggi yang perlu Dinas bina dan beri pelatihan dalam meningkatkan produksi dan pemanfaatan pangan. Dari 138 kelompok yang menjadi sasaran dinas dalam membangun ketahanan pangan, ada beberapa kelompok yang menjadi perhatian dinas dalam membangun ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi:

“...Upaya dalam membangun ketahanan pangan kami lebih berfokus dalam peningkatan ketersediaan pangan daerah. Hal ini menjadi perhatian kami dikarenakan dalam pemenuhan akan pangan khususnya padi- padian dan sayur sayur masih kurang diproduksi pada daerah Kota Bukittinggi. Dan juga untuk mempermudah keterjangkauan pangan dan meningkatkan pemanfaatan pangan kami juga memberi pelatihan kepada UP3HP yang berada di daerah Kota Bukittinggi. KWT yang kami berikan perhatian lebih yaitu KWT Lancas dikarenakan KWT ini tergolong baru dan butuh arahan dan bimbingan di bidang pertanian. Sedangkan Gapoktan yang kami beri binaan untuk tahun ini adalah Gapoktan Pulai Sepakat yang mana Gapoktan ini lebih banyak gabungan anggota kelompok tani dan Gapoktan ini termasuk Gapoktan Berprestasi. Selanjutnya untuk diversifikasi pangan sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperlukan masyarakat adalah UP3HP Pelangi dikarenakan UP3HP ini banyak memberikan kontribusi ke daerah Kota Bukittinggi di bidang prestasi.”

(Wawancara dengan Ir. Nelfia, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 10.00 wib)

Berdasarkan wawancara diatas, dalam membangun ketahanan pangan dinas berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pemberdayaan kelompok -kelompok tersebut. Berbagai aksi dilakukan dinas dalam meningkatkan kualitas kelompok tersebut. Agar terjamin dalam Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan maka Dinas memperhatikan kelompok- kelompok tersebut agar lebih baik dan maju. Berikut kelompok yang menjadi Sasaran yang disampaikan Kabid Ketahanan Pangan dalam membangun ketahanan pangan yang peneliti pilih untuk diwawancarai :

Tabel 1.12

Daftar Beberapa Kelompok Sasaran dalam Membangun Ketahanan Pangan

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Tahun Pembentukan
1	KWT Lancas	Yunimar	2020
2	UP3HP Pelangi	Zuharnita	2011
3	Gapoktan Pulau Sepakat	Risnawati	2013

Sumber : website SIMLUHTAN

Sedangkan pada fungsi pengawasan, yang melakukan pengawasan pada pelaksanaan kegiatan dan program Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi adalah Kepala Dinas . Kepala Dinas selaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang ada dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh para staff dan anggotanya. Sedangkan Kepala Bidang Ketahanan pangan juga mengawasi para Seksi dan staff di lapangan terkait kegiatan

peningkatan ketahanan pangan. Dokumen kegiatan dilakukan oleh para anggota dan staff yaitu Laporan Kegiatan digunakan sebagai bentuk adanya pelaksanaan kegiatan. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala dinas dilakukan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan arahan dan tujuan yang dicapai. Hal tersebut sesuai dengan ucapan oleh Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi :

... Dalam pelaksanaan kegiatan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi juga ikut serta dalam mengawasi lingkungan internal yang ada di organisasi yang memiliki tanggung jawab agar pekerjaan sesuai dengan arahan.”
(wawancara dengan Febriko Robianto, S.E, M.M, kasubag perencanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 9.10 wib)

Dalam rangka membangun ketahanan tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi adalah pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh staff dalam menjalankan tugasnya di lapangan, dan pengawasan terhadap harga pangan tetap stabil agar masyarakat terjangkau dalam pemenuhan pangan, dinas menunjuk satu petugas untuk memantau dan mengawasi harga pangan di pasar Kota Bukittinggi.

Oleh karena itu, dalam membangun ketahanan pangan di Kota Bukittinggi perlu adanya manajemen yang baik. Manajemen yang baik akan membawa kita pada hasil yang lebih bagus. Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen dinas pertanian dan pangan kota Bukittinggi dalam membangun ketahanan pangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Manajemen Dinas Pertanian dan Pangan kota Bukittinggi dalam membangun ketahanan pangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dalam Rangka Membangun Ketahanan Pangan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kajian yang lebih khusus mengenai Manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dalam Rangka Membangun Ketahanan Pangan, dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Instansi terkait lainnya.

Memberikan pengetahuan dari hasil penelitian mengenai manajemen dinas pertanian dan pangan dalam rangka membangun ketahanan pangan, dan juga memberikan sumbangan penelitian dalam rangka menjabarkan secara detail tentang manajemen dinas pertanian dan pangan kota Bukittinggi dalam rangka membangun ketahanan pangan.



b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi pengetahuan dan pembelajaran tentang manajemen dinas pertanian dan pangan kota Bukittinggi untuk membangun ketahanan Pangan.

